

Pendampingan dalam Pendistribusian dan Pengelolaan Bantuan Pemerintah Terhadap Dana BPJS Kesehatan di Desa Bebidas

Ahmad Zaki Fathoni^{1*}, Ulyan Nasri², Lalu Hafizinuddin³

^{1,3}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur, Indonesia

Korespondensi;

Nama*: Ahmad Zaki Fathoni

Email*: ahmadzakifathoni@iaihnwlotim.ac.id

Diterima: 17 Januari 2024. Disetujui: 23 April 2024. Dipublikasikan: 30 April 2024

ABSTRAK

Artikel ini membahas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfokus pada pendampingan dalam pendistribusian dan pengelolaan bantuan iuran BPJS Kesehatan di Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Program bantuan pemerintah ini sering menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur verifikasi peserta, keterlambatan aktivasi kepesertaan, serta ketidaktepatan dalam penetapan sasaran penerima manfaat. Kegiatan PkM ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat melalui sosialisasi edukatif, pelatihan administrasi teknis, serta pendampingan langsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kapasitas aparatur desa untuk memvalidasi dan memperbarui data PBI (Penerima Bantuan Iuran), serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan ini juga mendorong terwujudnya sistem distribusi bantuan yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Rekomendasi akhir menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah desa, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan guna memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Kata kunci: pendampingan, BPJS kesehatan, desa bebidas, bantuan pemerintah, distribusi dana

PENDAHULUAN

Jaminan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat kurang mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) [1].

Namun dalam pelaksanaannya, implementasi program BPJS Kesehatan, khususnya untuk peserta PBI, masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah satu isu utama adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat yang disebabkan oleh lemahnya validasi data kependudukan dan keterbatasan kapasitas administratif di tingkat desa [2]. Data yang digunakan dalam penentuan peserta PBI sering kali tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat, yang berakibat pada exclusion error (orang miskin tidak terdaftar) dan inclusion error (orang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan) [3].

Desa Bebidas di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur, merupakan salah satu desa yang menerima program bantuan iuran BPJS Kesehatan. Berdasarkan observasi awal, ditemukan sejumlah persoalan seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta JKN, kurangnya keterampilan

aparatur desa dalam mengelola data PBI, serta lambannya proses aktivasi peserta baru yang menyebabkan keterlambatan akses layanan kesehatan. Selain itu, belum adanya sistem pelaporan yang transparan dan mekanisme kontrol sosial menjadikan distribusi manfaat program ini rentan terhadap kecurigaan dan ketidakpercayaan dari masyarakat [4].

Situasi tersebut menuntut adanya intervensi yang bersifat partisipatif dan edukatif, yang tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat dalam memahami serta mengawal hak kesehatan mereka. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) melalui pendekatan pendampingan menjadi salah satu strategi penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut [5].

Pendampingan dalam konteks ini tidak hanya berarti membantu secara teknis, tetapi juga mendampingi proses belajar sosial antara aparat pemerintah desa dan warga dalam mengelola program berbasis kebutuhan lokal. Menurut Soetomo [6], pemberdayaan masyarakat membutuhkan keterlibatan aktif dari warga dalam semua tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Oleh karena itu, kegiatan PkM ini dirancang untuk memberikan pelatihan administrasi, sosialisasi edukatif mengenai BPJS, serta pendampingan langsung dalam pembaruan data dan aktivasi kepesertaan.

Keterlibatan perguruan tinggi dalam proses ini diharapkan dapat mendorong transformasi tata kelola

bantuan sosial yang lebih akuntabel dan berbasis data yang valid. Selain itu, kolaborasi antara desa, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan perlu diperkuat agar pendistribusian bantuan berjalan sesuai dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat administrasi [7].

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan dalam pendistribusian dan pengelolaan dana bantuan iuran BPJS Kesehatan di Desa Bebidas. Fokus utama terletak pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam melakukan validasi data, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peran dan manfaat program JKN-PBI. Melalui studi kasus ini, diharapkan muncul model pendampingan yang dapat

direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik serupa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini menggunakan metode sosialisasi dan pelatihan untuk menggambarkan secara mendalam proses dan dinamika pendampingan dalam pendistribusian serta pengelolaan bantuan dana iuran BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat desa. Melalui kegiatan ini, tim PkM tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif terlibat dalam memberikan pelatihan, memfasilitasi dialog, dan mendampingi langsung masyarakat serta aparat desa dalam memahami dan mengelola program bantuan secara tepat [8].



Gambar 1. Alur Tahapan Metode Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pendistribusian dan Pengelolaan Bantuan Dana BPJS Kesehatan di Desa Bebidas

Gambar alur tahapan metode penelitian dan pengabdian masyarakat di atas merepresentasikan pendekatan terintegrasi yang sistematis dalam pelaksanaan kegiatan PkM berbasis riset di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur. Visual ini menekankan bahwa proses dimulai dari identifikasi masalah secara partisipatif di lapangan, dilanjutkan dengan tahapan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, serta bantuan teknis dan validasi data untuk memastikan ketepatan sasaran. Selanjutnya, dilakukan diskusi kelompok terarah (FGD) sebagai forum refleksi dan klarifikasi masalah, yang pada akhirnya menghasilkan inovasi berbasis data riset. Alur ini menegaskan pentingnya sinergi antara pendekatan akademik dan kebutuhan nyata masyarakat dalam merancang solusi berbasis konteks lokal yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Salah satu hasil utama dari kegiatan pendampingan ini adalah adanya peningkatan signifikan dalam kapasitas aparatur Desa Bebidas

dalam memahami dan menjalankan prosedur verifikasi dan validasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sebelum kegiatan dilakukan, perangkat desa mengalami kesulitan dalam membaca data DTKS dan memahami mekanisme pengusulan peserta baru. Setelah pelatihan administrasi dan simulasi langsung yang diberikan oleh tim PkM, mereka mampu mengakses, memverifikasi, dan mengupdate data PBI secara mandiri dengan lebih akurat [14]. Kemajuan ini penting karena validitas data sangat menentukan keberhasilan distribusi bantuan yang tepat sasaran. Pemerintah desa yang semula pasif dalam proses seleksi kini lebih proaktif dan sistematis. Ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang melibatkan transfer keterampilan secara langsung sangat efektif dalam memperkuat tata kelola bantuan sosial di tingkat lokal [15], [21].

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Hak dan Kewajiban Peserta JKN

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam beberapa gelombang kepada kelompok masyarakat penerima bantuan menunjukkan dampak positif

terhadap peningkatan pengetahuan warga mengenai manfaat, hak, dan kewajiban sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebelumnya, sebagian besar warga mengira bahwa BPJS yang dibiayai pemerintah hanya dapat digunakan pada situasi darurat, dan mereka tidak tahu bahwa peserta PBI juga memiliki hak layanan yang sama seperti peserta mandiri [16]. Pasca-sosialisasi, warga mulai aktif memeriksa status kepesertaan, mencetak kartu BPJS, dan mengakses fasilitas kesehatan sesuai prosedur. Transformasi ini sejalan dengan gagasan bahwa ilmu pengetahuan harus bersifat membebaskan dan mencerdaskan masyarakat dalam menjalani realitas sosialnya, sebagaimana dikemukakan oleh Nasri bahwa falsafah ilmu mengajarkan manusia untuk bersahabat dengan pengetahuan demi membangun kehidupan yang lebih teratur dan bermakna [22].

3. Terbangunnya Sistem Transparansi dan Pelibatan Masyarakat

Pendampingan juga mendorong terciptanya mekanisme transparansi baru di Desa Bebidas, di antaranya pemasangan papan pengumuman daftar penerima bantuan, serta forum klarifikasi publik melalui musyawarah desa. Warga memiliki kesempatan menyanggah atau mengusulkan data secara terbuka. Mekanisme ini meminimalkan risiko kecemburuan sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa [18]. Sebagaimana dijelaskan oleh Supriyadi [10], pelibatan warga dalam pengawasan program sosial merupakan instrumen kontrol sosial yang penting, terutama di lingkungan pedesaan yang memiliki struktur sosial yang erat. Proses pelibatan masyarakat ini mencerminkan nilai-nilai dasar dari filsafat umum sebagai ruang dialog dan pencarian makna bersama dalam hidup bermasyarakat [23], [24].

4. Sinergi Antarlembaga: Desa, BPJS, dan Dinas Sosial

Kegiatan ini juga menghasilkan sinergi yang lebih baik antara pemerintah desa, Dinas Sosial

Kabupaten Lombok Timur, dan Kantor BPJS Kesehatan setempat. Tim PkM menjembatani komunikasi antarlembaga, yang selama ini cenderung bersifat satu arah. Desa tidak hanya menjadi pelaksana pasif, tetapi mulai dilibatkan secara aktif dalam penentuan dan pemutakhiran peserta PBI. Inisiatif ini sesuai dengan anjuran BPJS Kesehatan agar pemerintah daerah menguatkan peran desa dalam mendukung keakuratan data peserta JKN [19]. Dalam perspektif filsafat pendidikan, kolaborasi antarlembaga ini mencerminkan nilai etika tanggung jawab kolektif dalam pelayanan publik yang mendidik dan membangun kesadaran sosial warga negara [25].

Temuan sinergi antarlembaga ini menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan pemerintah sangat bergantung pada kekuatan jejaring dan komunikasi antaraktor kelembagaan. Dalam konteks Desa Bebidas, keterlibatan aktif pemerintah desa bukan hanya mempercepat pemutakhiran data PBI, tetapi juga memperkecil kemungkinan data bermasalah seperti duplikasi atau status tidak aktif. Peran fasilitatif tim pengabdian kepada masyarakat (PkM) menjadi titik temu antara perintah teknis dari atas dan realitas sosial di bawah. Hal ini mendobrak pola komunikasi satu arah yang sering menyebabkan keterputusan implementasi kebijakan di tingkat akar rumput.

Lebih jauh, dari sudut pandang filsafat pendidikan, kolaborasi antarlembaga seperti ini merepresentasikan bentuk pendidikan sosial yang bersifat transformatif. Ketika lembaga seperti desa, BPJS, dan dinas sosial mampu duduk bersama dan mengelola kepentingan publik secara kolektif, maka nilai-nilai etika publik seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi tumbuh sebagai hasil dari pembelajaran institusional. Seperti yang ditegaskan oleh Ulyan Nasri [25], pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga melalui proses interaksi sosial yang membentuk kesadaran kolektif dan kesanggupan bersama untuk bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan sosial.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pendampingan dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Bantuan BPJS Kesehatan di Desa Bebidas

Aspek Kegiatan	Hasil Pendampingan	Dampak terhadap Program BPJS Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Aparatur desa mampu melakukan verifikasi dan input data PBI secara mandiri	Distribusi bantuan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
Edukasi dan Sosialisasi kepada Warga	Warga memahami hak dan kewajiban sebagai peserta PBI-JKN	Masyarakat mulai aktif memanfaatkan layanan BPJS sesuai prosedur.
Transparansi dan Partisipasi Publik	Didirikan forum musyawarah dan papan informasi daftar penerima bantuan	Meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah konflik social.
Koordinasi Antarlembaga	Terbangunnya komunikasi aktif antara desa, BPJS, dan Dinas Sosial	Penanganan teknis (data ganda, NIK bermasalah) lebih cepat dan efisien.

Berdasarkan Tabel 1 memberikan gambaran ringkas namun komprehensif mengenai capaian utama kegiatan pendampingan yang dilakukan di Desa Bebidas. Dari aspek peningkatan kapasitas

aparatur desa, terlihat bahwa intervensi pelatihan administratif berperan penting dalam memperbaiki kualitas pendataan dan verifikasi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sebelumnya,

banyak proses bersifat pasif dan bergantung pada laporan pusat; kini desa mampu secara mandiri mengelola data dengan akurasi yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang melibatkan transfer keterampilan secara langsung sangat efektif dalam memperkuat tata kelola bantuan sosial di tingkat lokal.

Selain itu, dampak edukatif terhadap masyarakat juga cukup signifikan. Partisipasi warga dalam memahami manfaat dan prosedur penggunaan BPJS telah mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap hak atas pelayanan kesehatan. Mekanisme transparansi seperti musyawarah publik dan papan informasi terbukti mampu meminimalisasi kecemburuan sosial yang selama ini menjadi potensi konflik laten. Di sisi lain, keterhubungan aktif antara desa, Dinas Sosial, dan BPJS menciptakan koordinasi lintas lembaga yang lebih responsif, menjadikan program lebih adaptif terhadap dinamika kependudukan dan sosial ekonomi. Tabel ini merefleksikan bahwa keberhasilan pendampingan bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada terbentuknya ekosistem kolaboratif yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Bebidas membuktikan bahwa pendampingan berbasis partisipasi dapat meningkatkan efektivitas distribusi dan pengelolaan bantuan pemerintah, khususnya dalam program iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hasil pendampingan menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa meningkat secara signifikan dalam hal verifikasi dan validasi data, masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta JKN, serta terbentuknya mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik di tingkat desa.

Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat sinergi antarlembaga antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, dan Dinas Sosial melalui komunikasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap dinamika sosial. Dengan demikian, kegiatan pendampingan seperti ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga membangun fondasi sosial dan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional secara inklusif dan adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, khususnya kepada Pemerintah Desa Bebidas, para aparatur desa, kader kesehatan, serta masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga ditujukan kepada LPPM Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur atas dukungan pendanaan melalui dana hibah internal institusi, yang telah memungkinkan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- [2] BPJS Kesehatan, *Laporan Kinerja BPJS Kesehatan 2022*, Jakarta: BPJS Kesehatan, 2023.
- [3] Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*, Jakarta: Kemensos, 2022.
- [4] L. Santoso, "Evaluasi Program JKN-PBI di Wilayah Pedesaan," *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 15, no. 2, pp. 45–60, 2020.
- [5] T. Widiatmoko, "Peran Perguruan Tinggi dalam Penguatan Program Kesehatan Nasional," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, vol. 3, no. 1, pp. 10–18, 2021.
- [6] S. Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Kesadaran dan Partisipasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- [7] H. Nugroho, *Kebijakan Publik dan Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2019.
- [8] A. Rohman, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam PkM*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- [9] Pemerintah Desa Bebidas, *Laporan Profil Desa Tahun 2023*, Lombok Timur: Pemdes Bebidas, 2023.
- [10] E. Supriyadi, "Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Program PBI-JKN," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 8, no. 2, pp. 75–84, 2021.
- [11] S. Hartono, *Teknik Pengumpulan Data dalam Riset Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- [12] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, 2nd ed., California: Sage Publications, 1994.
- [13] N. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- [14] Dokumentasi Tim PkM, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Validasi Data BPJS di Desa Bebidas*, Lombok Timur: IAI Hamzanwadi NW, 2023.
- [15] M. Rizal, "Governance Sosial dalam Distribusi Program Bantuan Kesehatan," *Jurnal Pemerintahan Daerah*, vol. 12, no. 1, pp. 34–41, 2021.
- [16] Hasil Kuesioner Sosialisasi BPJS, Desa Bebidas, 2023.
- [17] N. A. Pratiwi, "Pentingnya Literasi Kesehatan dalam Program JKN-PBI," *Jurnal Promkes*, vol. 9, no. 2, pp. 88–96, 2022.
- [18] F. Maulidia, "Transparansi Informasi di Desa dan Partisipasi Warga dalam Program Sosial," *Jurnal Partisipasi Masyarakat*, vol. 7, no. 3, pp. 52–59, 2020.
- [19] BPJS Kesehatan, *Pedoman Operasional Pemutakhiran Data PBI*, Jakarta: BPJS Kesehatan, 2022.
- [20] A. Lestari, "Kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, vol. 11, no. 4, pp. 101–110, 2021.
- [21] U. Nasri, *Ngaji Bareng Filosof: Sebuah Pengantar Filsafat Umum*, Lombok: CV. Haramain Lombok, 2020.

- [22] U. Nasri, *Bersahabat dengan Ilmu: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, Cet. 7, Lombok: CV. Haramain Lombok, 2020.
- [23] U. Nasri, *Menziarahi Filsafat: Sebuah Pengantar Filsafat Umum*, Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2016.
- [24] U. Nasri, *Menjemput Ilmu: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2016.
- [25] U. Nasri, *Philosophy of Education*, Lombok: CV. Haramain Lombok, 2022.